



Yogya Belum Ramah Difabel

■ Penyandang Disabilitas Desak Dewan Sahkan Raperda Disabilitas

Kami datang ke sini untuk meminta dewan segera menggelar rapat paripurna dan mengesahkan Raperda disabilitas

Arni Surwanti

YOGYA. TRIBUN - Puluhan penyandang disabilitas menggeruduk kantor DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (7/3) siang. Mereka menagih janji para wakil rakyat itu untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Adanya Perda disabilitas tersebut, diharapkan bisa memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Sejumlah penyandang disabilitas itu mendatangi kantor wakil rakyat itu dengan membawa beberapa pamflet dan poster. Di antaranya bertuliskan 'Kami Mendukung Segera Disahkannya Perda Disabilitas'.

Kota Yogyakarta', dan tulisan lainnya.

Kedatangan mereka sudah kedua kalinya sejak bulan November lalu, dan meminta pembahasan Raperda dilanjutkan.

"Kami datang ke sini untuk meminta dewan segera menggelar rapat paripurna dan mengesahkan Raperda disabilitas ini," kata Koordinator Forum Pengusutan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta, Arni Surwanti, di sela-sela audiensi di gedung DPRD setempat.

1. Pnsos
2. Bag. Hukum
✓ Netral
✓ Biasa
✓ Untuk diketahui

Yogya Belum Ramah Difabel

• Sambungan Hal 13

Menurut Arni, Kota Yogyakarta ini satu-satunya daerah tingkat II DIY yang belum mengesahkan raperda disabilitas. Padahal, sudah ada komitmen mewujudkan kota inklusi.

Namun, hingga awal Maret ini Raperda belum segera diketok dan membuat tanda tanya para penyandang dan pegiat disabilitas.

Menurut Arni, pembahasan ini pun terkesan stagnan. Pasalnya, muatan raperda perlindungan hak penyandang disabilitas itu sudah dibahas sejak 2015. Pada November 2016 forum penyandang disabilitas juga telah mendatangi dewan dan meminta pembahasan raperda dilanjutkan.

"Kami juga sempat mendengar ada penundaan pengesahan raperda itu lantaran penyesuaian naskah akademik dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas," ulasnya.

Dia menyebutkan, dalam pertemuan itu disepakati pembahasan raperda dilanjutkan dan komunitas penyandang disabilitas memberikan masukan naskah akademik raperda yang telah disesuaikan dengan UU nomor 8 tahun 2016. Dia juga menambahkan, keberadaan Perda ini sangat penting dan dirasa mampu memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Menurutnya, sejauh ini untuk wilayah Kota Yogyakarta masih belum teralalu ramah difabel. Di antaranya adalah masih banyak kaum difabel yang sulit mengakses tempat perbelanjaan di

Malioboro karena toko di sisi barat belum dilengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas. Termasuk, beberapa jalan yang belum ramah difabel, karena trotoar jalan sangat sempit dan tidak bisa diakses untuk difabel.

"Kaum difabel juga sulit mendapat pekerjaan. Maka, kami meminta adanya Perda ini menjamin pekerjaan dengan dua persen untuk PNS dan satu persen di swasta," jelasnya.

Payung hukum

Muhammad Kholid anggota PPID, juga mendesak Perda disabilitas perlu segera disahkan karena akan menjadi payung hukum. Di antaranya, adalah untuk melindungi hak-hak kaum difabel di bidang pendidikan, kriminalitas, dan pekerjaan sudah sangat mendesak dipenuhi.

"Perda perlindungan pe-

nyandang disabilitas itu penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mengingat saat ini, masih banyak hambatan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kekerasan kepada penyandang disabilitas," ulasnya.

Sosialisasi

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Yogya, Winarsih juga meminta sosialisasi dilakukan secara menyeluruh ke masyarakat setelah Perda diketok. Termasuk, kata dia, sanksi yang dijatuhkan pun harus disosialisasikan.

"Sosialisasi perda ini sangat penting agar dipahami dan benar-benar dipatuhi. Karena, kecenderungan warga yang jarang membaca Perda," urai Winarsih. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005